

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5-03 KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengguna Anggaran :
a. Nama : PATTA AMIR, SP
b. NIP : 19641127 198711 1 003
c. Jabatan : PENGGUNA ANGGARAN

| KODE | NAMA FORMULIR |
|-----------------------|---|
| DPA - PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| DPA - BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| DPA - PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan Oleh,
PPKD

Drs. MUHTAR, MM
NIP. 186801041998011001

Benteng, 4 Januari 2023
Pengguna Anggaran

PATTA AMIR, SP
NIP. 19641127 198711 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng 92812 Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 900/55/I/2023/BPKPD

TENTANG

**PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepulauan Selayar, maka diperlukan adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan | : Rp0,00 |
| 2. Belanja Operasi | : Rp6.053.362.425,00 |
| 3. Belanja Modal | : Rp15.140.500,00 |
| 4. Total Belanja | : Rp6.068.502.925,00 |
| 5. Pembiayaan | : Rp0,00 |

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 4 Januari 2023

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
KEPALA BADAN,**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR" at the top and "KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Drs. MUHTAR, M.M.

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199603 1 001

| | |
|---|-------------------------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR R DPA- SKPD |
| PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023 | |

ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 6.068.502.925,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 6.053.362.425,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.530.883.925,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.522.478.500,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 15.140.500,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.140.500,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (6.068.502.925,00) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN | (6.068.502.925,00) |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan *) | | Rencana Penarikan Dana per Bulan *) | |
|---|----------|-------------------------------------|----------------------|
| Januari | Rp. 0,00 | Januari | Rp. 6.068.502.925,00 |
| Februari | Rp. 0,00 | Februari | Rp. 0,00 |
| Maret | Rp. 0,00 | Maret | Rp. 0,00 |
| April | Rp. 0,00 | April | Rp. 0,00 |
| Mei | Rp. 0,00 | Mei | Rp. 0,00 |
| Juni | Rp. 0,00 | Juni | Rp. 0,00 |
| Juli | Rp. 0,00 | Juli | Rp. 0,00 |
| Agustus | Rp. 0,00 | Agustus | Rp. 0,00 |
| September | Rp. 0,00 | September | Rp. 0,00 |
| Oktober | Rp. 0,00 | Oktober | Rp. 0,00 |
| November | Rp. 0,00 | November | Rp. 0,00 |
| Desember | Rp. 0,00 | Desember | Rp. 0,00 |
| Jumlah | Rp. 0,00 | Jumlah | Rp. 6.068.502.925,00 |

Benteng, 4 Januari 2023
 Pengguna Anggaran

 PACTA AMIR, SP
 NIP 196410271987111003

Mengesahkan
 SKPD

 Drs. MUHTAR, MKS
 NIP 196801041996011003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1. | INCE RAHIM, S.Pd., S.H., M.H. | 19630515 198703 1 022 | KOORDINATOR | 1 |
| 2. | AL AMIN, S.Pi | 19771014 201501 1 001 | ANGGOTA | 2 |
| 3. | NUR SOFYANSYAH, S.STP, MAP | 19920126 201206 1 001 | ANGGOTA | 3 |
| 4. | JUFRI NUR, S.E | 19810607 200803 1 003 | ANGGOTA | 5 |
| 5. | AKHMAD JUNAEDI, S.Sos | 19800307 200604 1 013 | ANGGOTA | 5 |
| 6. | LISNA LIANA, S.Si, M.Ec.Dev | 19850612 201001 2 038 | ANGGOTA | 6 |
| 7. | ANDI ASWAR, S.T | 19790219 200502 1 003 | ANGGOTA | 7 |

*) Sesuai dengan periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMULIR
DPA-BELANJA SKPD

SI : 5-03.5-04.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: 5-03.5-04.0-00.01.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

| URAIAN | SUMBER DANA | LOKASI | TAHUN-1 | JUMLAH (Rp) | | | | TAHUN+1 |
|--|-------------------------|------------------------|---------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | | TAHUN N | | | | |
| | | | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | BELANJA TIDAK TERDUGA | BELANJA TRANSFER | |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 15.140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068.502.925,00 |
| KEPEGAWAIAN | | | | 15.140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.266.887.925,00 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 15.140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170.304.125,00 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.673.100,00 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.372.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.100,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814.000,00 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353.000,00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.602.855.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602.855.925,00 |
| Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530.883.925,00 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.069.000,00 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765.000,00 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100.000,00 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.109.000,00 |
| Pembastasaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.109.000,00 |
| Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | | | | 15.037.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.037.500,00 |
| Pendidikan dan Pengabdian Administrasi Kepegawain | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.736.000,00 |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201.500,00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 290.364.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.364.700,00 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.846.000,00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.119.700,00 |
| Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.870.000,00 |
| Penyediaan Bahan/Material | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.527.000,00 |
| Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.339.000,00 |
| Pembastasaan Aspek Dinamis pada SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.980.000,00 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokal belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.673.000,00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 15.140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140.500,00 |

| URAIAN | SUMBER DANA | LOKASI | TAHUN-1 | | TAHUN N | | | TAHUN+1 |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|
| | | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | BELANJA TIDAK TERDUGA | BELANJA TRANSFER | JUMLAH | |
| Pengadaan Mebel | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0,00 | 15.140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140.500,00 |
| Penyediaan Jasa Peningkatan Ususan/Pemeliharaan Daerah | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 108.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.712.000,00 |
| Penyediaan Jasa Sumat Mnyaurat | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 26.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.836.000,00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 82.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.776.000,00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 100.511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.511.000,00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 50.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.560.000,00 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 49.951.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.951.000,00 |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | | |
| Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawain ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 1.095.563.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.563.800,00 |
| Penyusunan Rencana Keibukuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 200.539.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.539.300,00 |
| Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 47.870.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.870.300,00 |
| Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 35.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.060.000,00 |
| Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemertintahan | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 22.503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.503.000,00 |
| Fasilitas Lembaga Profesi ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 13.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.246.000,00 |
| Pengadaan Data Kepegawain | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 18.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.865.000,00 |
| Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawain | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 48.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.742.000,00 |
| Mutasi dan Promosi ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 12.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.153.000,00 |
| Pengadaan Mutasi ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 422.905.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.905.800,00 |
| Pengendalian Keralikan Pangkat ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 43.279.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.279.400,00 |
| Pengendalian Promosi ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 140.325.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.325.200,00 |
| Pengembangan Kompetensi ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 239.301.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.301.200,00 |
| Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 368.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.084.000,00 |
| Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 9.388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.388.000,00 |
| Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diikat Fungsional | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 271.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.196.000,00 |
| Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 95.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500.000,00 |
| Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 86.034.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.034.700,00 |
| Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 8.006.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.006.100,00 |
| Pembinaan Disiplin ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 34.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.316.000,00 |
| Pengelolaan Penyelesaian Peringatan Dillipin ASN | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 18.402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.402.000,00 |
| PENDUKUNG DAN PELATIHAN | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | |
| Pengembangan Kompetensi Tolak | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 12.734.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.734.600,00 |
| Peningkatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Ususan Pemertintahan Kontur, Perangkat Daerah Penunjang, dan Ususan Pemertintahan Umum | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 12.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.576.000,00 |
| Sertifikasi, Kembangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Dana Abokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 802.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.635.000,00 |
| | | | 802.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.635.000,00 |
| | | | 436.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.752.000,00 |
| | | | 436.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.752.000,00 |
| | | | 365.883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.883.000,00 |

| URAIAN | SUMBER DANA | LOKASI | JUMLAH (Rp) | | | | | TAHUN+1 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------|
| | | | TAHUN-1 | TAHUN N | | | JUMLAH | |
| | | | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | BELANJA TIDAK TERDUGA | | |
| Penyelenggaraan Pengembangan, Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Keselamatan, dan Pekerjaan | Dana Abstrak Umum (DAU) | Lokasi belum dibuktikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.883.000,00 | 0,00 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan *) | | | 6.053.362.425,00 | 15.140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068.502.925,00 | 0,00 |
| | | Rp. 6.068.502.925,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. 0,00 | | | | | | |
| Jumlah | | Rp. 6.068.502.925,00 | | | | | | |

Bonteng, 4 Januari 2023

Disetujui oleh,

 PATTAMIR, SP
 NIP. 19641127 198711 003

Disiapkan oleh,

 DRS. MUHTAR, MM
 NIP. 19680104 199601 1001

1 periodisasi SPD